

BULLS & BEARS

Dibayangi Aksi Jual

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi mengalami *technical rebound*, awal pekan ini. Meski demikian, potensi kenaikan IHSG dibayangi tekanan aksi jual seiring meningkatnya spekulasi agresivitas bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed menaikkan suku bunga acuan ke depan.



Analis Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan memperkirakan IHSG berpeluang mengalami *technical rebound* apabila pergerakannya mampu bertahan di atas level 6.800.

Sebelumnya, IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelang akhir pekan lalu melemah di tengah kenaikan bursa saham kawasan Asia. IHSG ditutup melemah 66,1 poin atau 0,96 persen ke posisi 6.814,53. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 11,74 poin atau 1,2 persen ke posisi 966,74.

"Bursa regional Asia trennya menguat. Hal ini tampaknya seiring kenaikan bursa global yang dipengaruhi pasca rilis data inflasi dan klaim pengangguran mingguan Amerika Serikat. Sementara dari dalam negeri, indeks IHSG masih menghadapi fase terkoreksi," tulis Tim Riset Pilarmas Investindo dalam ulasannya di Jakarta.

Inflasi AS pada September tercatat di 8,2 persen atau lebih rendah dari Agustus 8,3 persen dan klaim pengangguran mingguan AS naik 9.000 menuju level 228.000 klaim.

■ **mad/Ant/E-10**

KUOTA

Pemerintah Perbanyak Penggunaan Tenaga Surya di Papua

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pekan lalu, meresmikan pemasangan 450 unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) di Provinsi Papua. Hal ini adalah komitmen pemerintah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun infrastruktur energi yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Suatu kebahagiaan bagi kami (pemerintah) bisa menghadirkan infrastruktur energi yang bisa bermanfaat di tiga kabupaten ini," ucap Sekretaris Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Sahid Junaidi, saat peresmian PJU-TS di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, dikutip dari laman resmi esdm, Minggu (16/10).

Pemasangan PJU-TS di Provinsi Papua ini, sambung Sahid, merupakan program Tahun Anggaran 2021 Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE atas aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Komisi VII DPR RI.

Adapun 450 unit titik PJU-TS yang diresmikan tersebar di tiga kabupaten di Provinsi Papua yakni Kabupaten Jayawijaya 70 unit, Kabupaten Lanny Jaya 100 unit, dan Kabupaten Yahukimo 280 unit. Keseluruhan titik sudah terpasang dan beroperasi dengan baik, memberikan manfaat dan penerangan bagi masyarakat. ■ **ers/E-10**

Ekspor Ikan Hias



KORAN JAKARTA/WAHYU AP

» Pengunjung melihat ikan hias yang dipamerkan dalam Kalikan 2022 di Jiexpo, Jakarta, Sabtu (15/10). Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan nilai ekspor ikan hias di Indonesia pada 2021 mencapai 34,5 juta dollar AS atau meningkat dari 27,6 juta dollar AS pada 2017.

Kesejahteraan Penduduk | Per Maret 2022, Jumlah Penduduk Miskin Capai 26,16 Juta Jiwa

Atasi Kemiskinan di Perdesaan

Apabila tingkat kesejahteraan petani perdesaan tak segera ditangani, hal itu dapat berdampak terhadap produktivitas pertanian dan regenerasi petani muda.

JAKARTA - Produsen pangan berharap pemerintah membantu mengurai masalah kemiskinan di desa lantaran petani banyak tinggal di perdesaan. Apabila kesejahteraan mereka tak diperhatikan, produksi pertanian dapat terganggu, terlebih di tengah ancaman krisis pangan global.

Ketua Umum Serikat Petania Indonesia (SPI), Henry Saragi, menyebut perdesaan menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan terbanyak.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, per Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 26,16 juta jiwa atau sekitar 9,54 persen dari total penduduk dengan rincian 14,34 juta orang di perdesaan dan 11,82 juta orang di perkotaan.

"Situasi pedesaan tempat bermukimnya para petani penegak kedaulatan pangan tersebut tentu sangat mengkhawatirkan dan memicu krisis pangan dan lanjut ekonomi di perkotaan," tegasnya pada *Koran Jakarta*, Minggu (16/10).

Faktanya, lanjut Henry, nilai tukar petani (NTP) yang dijadikan patokan kesejahteraan petani dan daya beli pada 2022 belum memuaskan, fluktuatif, dan cenderung turun. Berkaca dari laporan BPS, selama September terjadi kenaikan biaya yang dikeluarkan oleh petani (Ib) di seluruh subsektor NTP.

"Tanpa adanya perbaikan kebijakan, tentu hal ini semakin membebani para petani di Indonesia, karena sebelum kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), biaya produksi yang dikeluarkan pertanian konvensional trennya sudah meningkat," paparnya.

Hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat yang sebelumnya sudah didera oleh Covid-19 selama 2020-2021. Dampak pandemi juga sempat mengakibatkan kenaikan angka kemiskinan pada 2020 dan perlahan-lahan turun hingga Maret 2022.

« Tanpa adanya perbaikan kebijakan, tentu hal ini semakin membebani para petani di Indonesia. »

HENRY SARAGI
Ketua Umum Serikat Petania Indonesia

Setiap 16 Oktober diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia (HPS) oleh masyarakat dunia. Tahun ini, peringatan HPS dibayangi ancaman krisis pangan. Kekhawatiran krisis pangan bersumber dari catatan Badan Pangan Dunia (FAO) terkait kenaikan harga pangan global. Secara umum indeks harga pangan Januari – Oktober tersebut, lebih tinggi dari indeks harga pada 2021 dan 2022.

Krisis pangan juga diindikasikan dengan jumlah angka kelaparan, yakni Global Report on Food Crisis (GRFC) dan SOFI. Secara global, menurut GRFC 2022, tingkat kelaparan tetap mengkhawatirkan seperti pada 2021, sekitar 193 juta orang sangat rawan pangan dan membutuhkan bantuan mendesak di 53 negara.

Laporan SOFI pada 2022 mencatat angka kelaparan penduduk dunia mencapai 828 juta orang pada 2021. Angka tersebut meningkat 46 juta orang dibandingkan 2020 (782 juta orang) dan meningkat 150 juta orang dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Dengan data terakhir ini, PBB memprediksi jumlah angka kelaparan pada 2030 menembus 670 juta orang atau di atas target program *zero hunger*.

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi SPI, Muhammad Qomarunnajmi mendesak petani sebagai produsen pangan harus dilindungi agar bisa berkontribusi mengatasi masalah pangan global.

Salah satunya melalui jaminan harga seiring peningkatan biaya produksi akibat kenaikan harga pupuk dan bahan bakar minyak (BBM).

Tren Naik

Qomar mengakui dalam beberapa bulan terakhir tren harga gabah dan juga beras memang naik. Pada awal bulan ini, gabah sebesar 5.500 rupiah per kilogram (kg).

"Meskipun dihitung ada keuntungan petani, tetapi di sisi lain ada kenaikan biaya produksi juga dari kenaikan harga pupuk dan BBM, sehinhga masih belum cukup menguntungkan untuk petani," pungkasnya.

Terkait ancaman krisis pangan ini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Jakarta, Minggu (16/10), meminta seluruh stakeholder terkait, untuk saling mendukung, mulai dari hulu hingga hilir untuk menciptakan ekosistem pertanian baik. Hal itu dimaksudkan gar petani nyaman berproduksi. ■ **ers/E-10**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA SELATAN I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA
JL. RAYA PASAR MINGGU NO.11 PANCORAN, JAKARTA SELATAN 12780
TELEPON (021) 7992961, 7993028, 7946091; FAKSIMILE (021) 7994253; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI PAJAK
NOMOR PENG-1/KPP.0412/2022

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV akan menyelenggarakan lelang barang sitaan milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak, berupa:

Objek Lelang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1 (satu) Unit Mobil Toyota New Camry 2.4V AT Tahun 2007 Warna Silver Metalik Nomor Registrasi B 1549 KE Nomor Rangka MR053BK4079002507 Nomor Mesin 2AZE047818	68.000.000	13.600.000

Pelaksanaan lelang:
Hari / Tanggal : Senin, 31 Oktober 2022
Batas Akhir Penawaran : 11.00 WIB (waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Jakarta Pusat

Syarat dan tata cara pelelangan:
1. Peserta lelang memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id.
2. Penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta lelang (*E-Auction*) dengan penawaran tertutup (***Close Bid***) yang ditayangkan pada domain lelang.go.id. Syarat ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut.
3. Jumlah nominal uang jaminan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan pada pengumuman lelang dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil) serta harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Jakarta IV selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
5. Pemenang lelang wajib melunasi pokok lelang ditambah bea lelang 3% paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dilunasi uang jaminan akan disetor ke Kas Negara dan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan di seluruh wilayah Indonesia.
6. Objek dilelang dengan ketentuan dan kondisi apa adanya ***(as is)***. Foto dan spesifikasi tentang objek lelang dapat dilihat pada alamat domain diatas. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang pada tanggal 17 – 30 Oktober 2022 pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB bertempat di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga, Jalan Raya Pasar Minggu No. 11 Pancoran, Jakarta Selatan.
7. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap barang tersebut maka pihak berkepentingan/peserta lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan apapun kepada Penjual dan Pejabat Lelang.
8. Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga, Telepon (021)7993028, 7992961 atau KPKNL Jakarta IV, Telepon (021) 3440910 pada hari dan jam kerja.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2022
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Jakarta Setiabudi Tiga

ttd

Dwi Prasetyo Widodo

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HARTA PAILIT PT ANEKA PUTRA SANTOSA (DALAM PAILIT)

Tim Kurator PT Aneka Putra Santosa (Dalam Pailit) yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 350/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 20 Desember 2021, berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) eksekusi barang bergerak milik PT Aneka Putra Santosa (Dalam Pailit), melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV dengan jadwal dan ketentuan sebagai berikut:

Hari, Tanggal : Senin, 24 Oktober 2022
Cara Penawaran : Melalui internet dengan penawaran secara elektronik tanpa kehadiran peserta lelang (closed bidding)
Batas Akhir Penawaran : Jam 10:00 Waktu server sesuai WIB
Alamat Domain : **http://www.lelang.go.id**
Tempat Lelang : KPKNL Jakarta IV, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Jakarta Pusat
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran
Objek Lelang berupa : Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan uraian sebagai berikut:

NO	NOPOL	NOMOR MESIN	NOMOR RANGKA	MERK	TAHUN	WARNA	BPKB	STNK	TANGGAL JATUH TEMPO PAJAK KENDARAAN
1	B 2971 SYQ	L12B32316196	MHRDD1850JJ905648	HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT	2018	ABU-ABU BAJA METALIK	O-06086130	ADA	20/12/2021
2	B 2300 SYQ	L12B32312996	MHRDD1850JJ904723	HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT	2018	ABU-ABU BAJA METALIK	O-06080755	ADA	14/12/2021
3	B 2961 SYQ	L12B32316176	MHRDD1850JJ905646	HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT	2018	ABU-ABU BAJA METALIK	O-06086171	ADA	20/12/2022
4	B 2963 SYQ	L12B32316188	MHRDD1850JJ905634	HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT	2018	ABU-ABU BAJA METALIK	O-06086172	ADA	20/12/2021
5	B 2965 SYQ	L12B32316186	MHRDD1850JJ905632	HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT	2018	ABU-ABU BAJA METALIK	O-06086173	ADA	20/12/2021
6	B 2435 SYQ	L12B32316033	MHRDD1850JJ905450	HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT	2018	ABU-ABU BAJA METALIK	O-06082252	ADA	15/12/2021
7	B 2442 SYQ	L12B32315800	MHRDD1850JJ905201	HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT	2018	ABU-ABU BAJA METALIK	O-06082254	ADA	15/12/2021
8	B 2437 SYQ	L12B32315794	MHRDD1850JJ905192	HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT	2018	ABU-ABU BAJA METALIK	O-06082253	ADA	15/12/2021
9	B 2092 SYQ	L12B32314144	MHRDD1850JJ905022	HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT	2018	ABU-ABU BAJA METALIK	O-06079687	TIDAK ADA	13/12/2021
10	B 2941 SYQ	L12B32314928	MHRDD1850JJ905150	HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT	2018	ABU-ABU BAJA METALIK	O-06086002	ADA	20/12/2021
11	B 2107 SYQ	L12B32314366	MHRDD1850JJ905046	HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT	2018	ABU-ABU BAJA METALIK	O-06079697	ADA	13/12/2022
12	B 2106 SYQ	L12B32314375	MHRDD1850JJ905045	HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT	2018	ABU-ABU BAJA METALIK	O-06079696	TIDAK ADA	13/12/2021
13	B 2096 SYQ	L12B32314379	MHRDD1850JJ905044	HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT	2018	ABU-ABU BAJA METALIK	O-06079690	ADA	13/12/2022
14	B 2098 SYQ	L12B32314148	MHRDD1850JJ905038	HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT	2018	ABU-ABU BAJA METALIK	O-06079691	ADA	13/12/2022
15	B 2104 SYQ	L12B32314380	MHRDD1850JJ904832	HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT	2018	ABU-ABU BAJA METALIK	O-06079694	ADA	13/12/2021
16	B 2102 SYQ	L12B32311311	MHRDD1850JJ903927	HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT	2018	ABU-ABU BAJA METALIK	O-06079693	ADA	13/12/2021
17	B 2100 SYQ	L12B32311308	MHRDD1850JJ903949	HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT	2018	ABU-ABU BAJA METALIK	O-06079692	ADA	13/12/2022
18	B 2001 SYR	L12B32311467	MHRDD1850JJ904185	HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT	2018	ABU-ABU BAJA METALIK	O-06086401	ADA	20/12/2021
19	B 2094 SYQ	L12B32312584	MHRDD1850JJ904299	HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT	2018	ABU-ABU BAJA METALIK	O-06079689	ADA	13/12/2021
20	B 2547 SIV	L12B32364671	MHRDD1850KJ916811	HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT	2019	ABU-ABU BAJA METALIK	P-06942599	ADA	07/12/2021
21	B 2559 SIV	L12B32380797	MHRDD1850KJ922796	HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT	2019	ABU-ABU BAJA METALIK	P-06942607	ADA	07/12/2021

Keseluruhan unit diatas dijual dalam **1 (satu)** Paket **("Objek Lelang")** dengan Nilai Limit sebesar **Rp 2.310.000.000,-** dan Jaminan Penawaran Lelang sebesar **Rp 462.000.000,-.**

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG
1. Tata Cara Penawaran Lelang
Lelang dilaksanakan melalui internet dengan penawaran secara elektronik tanpa kehadiran peserta lelang *(closed bidding)* yang dapat diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id.
2. Peserta Lelang
Calon Peserta Lelang dapat berupa perseorangan atau badan usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain/website diatas, dengan mengunduh serta mengunggah softcopy KTP, NPWP dan rekening atas nama sendiri (uang jaminan penawaran lelang akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
3. Jaminan Penawaran Lelang
Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan penawaran lelang yang disyaratkan penjual yakni: **Rp. 462.000.000,-** disetor sekaligus (tidak dicicil).
b. Setoran uang jaminan penawaran lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Jakarta IV selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum batas akhir penawaran lelang.
c. Uang jaminan penawaran lelang milik peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan lagi kepada peserta lelang tanpa pemotongan, dan jika terdapat biaya transaksi perbankan akan menjadi tanggung jawab peserta lelang.
4. Penawaran Lelang
a. Penawaran harga lelang dapat dilakukan setelah uang jaminan penawaran lelang yang ditujukan ke Nomor VA dinyatakan sah diterima dan data identitas peserta lelang telah dinyatakan valid.
b. Penawaran Lelang dimulai dari harga limit. Penawaran lelang diajukan sampai batas waktu penawaran lelang berakhir, sebagaimana ditentukan diatas.
c. Dalam hal peserta lelang mengajukan penawaran lebih dari 1 (satu) kali untuk setiap objek lelang, penawaran yang dianggap sah dan mengikat adalah penawaran yang terakhir di unggah (upload).
5. Bea Lelang dan Pajak serta Pungutan
a. Nilai Limit tersebut belum termasuk bea lelang dan pajak pertambahan nilai serta pungutan sah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Pihak Penjual dan Pembeli menanggung bea dan pajak serta pungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pelunasan
a. Pemenang Lelang yang telah disahkan sebagai pembeli bertanggung jawab sepenuhnya atas pelunasan kewajiban pembayaran lelang termasuk pajak, bea, dan biaya/pungutan resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. Pemenang Lelang harus melunasi harga pembelian dan pajak pertambahan nilai sebesar 11% (sebelas persen) serta bea lelang pembeli sebesar 3% (tiga persen) yang ditujukan ke Nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan.
c. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan, maka penunjukannya sebagai pemenang lelang dibatalkan dan uang Jaminan Penawaran Lelang akan disetorkan seluruhnya ke negara.
7. Objek Lelang
Objek Lelang dilelang dalam kondisi apa adanya *("as is")* di tempat dimana aset-aset tersebut berada *("where is")*. Peserta lelang dianggap telah mengetahui keadaan atau kondisi objek lelang yang ditawar, berikut segala cacat atau kekurangannya baik yang terlihat maupun tidak terlihat serta resiko atau kewajiban yang timbul atas transaksi lelang dan atau kepemilikan atas Objek Lelang dimaksud sehingga Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
8. Pengambilan Objek Lelang
Jangka waktu pengambilan barang oleh Pemenang Lelang adalah sebagai berikut:
a. Pemenang Lelang wajib mengambil Objek Lelang yang terletak di Kantor PT Aneka Putra Santosa, Jalan Kapten Tendean No. 5, Jakarta Selatan, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal dinyatakan sebagai pemenang lelang;
b. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a telah lewat, sedangkan Pemenang Lelang belum mengambil Objek Lelang yang dimenangkan, maka Kurator tidak bertanggung jawab atas keamanan, kerusakan, kehilangan, berkurangnya nilai dan akibat-akibat lain yang mungkin timbul atas Objek Lelang;
c. Dalam hal Pemenang Lelang tidak mengambil Objek Lelang dalam jangka waktu yang ditentukan dalam huruf a diatas, maka Pemenang Lelang akan dibebankan biaya penyimpanan dan perawatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) perbulan berdasarkan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
9. Syarat Tambahan
a. Pelaksanaan Lelang dapat ditunda/dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan persiapan peserta lelang untuk mengikuti lelang adalah menjadi tanggungjawab Peserta Lelang sepenuhnya. Apabila karena satu dan lain hal terjadi pembatalan/penundaan lelang terhadap salah satu objek atau beberapa objek lelang tersebut diatas, maka peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual (Kurator), dan Pejabat Lelang / KPKNL Jakarta IV dan pihak terkait selaku pelaksana lelang.
b. Pemenang Lelang membebaskan penjual lelang dan pejabat lelang KPKNL Jakarta IV dari segala tuntutan hukum dari pihak manapun.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan menghubungi Tim Kurator setiap hari kerja pukul 10:00 s/d 16:00 WIB di No. HP : 0859 7328 1845.

Jakarta, 17 Oktober 2022
Tim Kurator PT Aneka Putra Santosa (Dalam Pailit)

ttd
Dian Priharyanti, S.H

ttd
Aisyah Aiko Pulukadang, S.H

Kendaraan Listrik

Optimalkan Penggunaan Komponen Lokal

JAKARTA – Pemerintah meminta produsen kendaraan listrik mengoptimalkan penggunaan komponen dalam negeri sehingga secara langsung akan meningkatkan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Sementara produsen berharap dukungan nyata dari pemerintah.

"Pengoptimalan nilai komponen lokal ini dapat meningkatkan potensi pasar kendaraan akibat diterbitkannya Inpres No 7 Tahun 2022," imbuh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, Minggu (16/10).

Upaya tersebut, lanjut Menperin, sesuai amanat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle).

Dengan demikian, kendaraan listrik yang telah memenuhi batasan minimal TKDN sesuai Perpres 55 Tahun 2019 dapat mengisi permintaan kendaraan dinas dan operasional pemerintah sesuai Inpres 7/2022.

Ditegaskan Agus, Kemenperin terus melakukan pendalaman terkait dengan industri kendaraan electric vehicle, baik itu untuk kendaraan roda empat maupun roda dua. "Khusus untuk roda dua, ada target dari Bapak Presiden dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bisa segera memproduksi dua juta unit pada 2025," ungkapnya.

Menperin optimistis target tersebut dapat tercapai dalam waktu dekat karena dukungan kapasitas produksi sepeda motor listrik dari 35 produsen kendaraan listrik mencapai satu juta unit per tahun. "Hal ini untuk mencapai target pemerintah untuk Indonesia menurunkan emisi sebanyak 29 persen pada 2030 dan mencapai target emisi nol atau net zero emission pada 2060," ucapnya.

Dukungan Riil

General Manager VIAR Motor Dimas Tommy Radityo berharap, Viar Motor sebagai produk anak bangsa bisa diterima masyarakat luas di Indonesia. Apalagi secara kualitas, sebenarnya produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk asing.

Namun, lanjutnya, dukungan pemerintah diperlukan bagi produk dalam negeri, seperti upaya membantu menanamkan kebanggaan memakai produk alam negeri. ■ **ers/E-10**